



## Pertumbuhan dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng

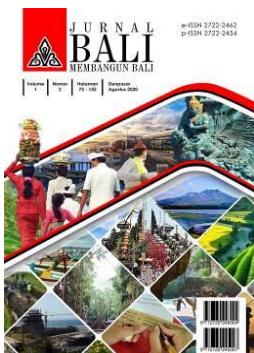
Ni Nengah Putri Yani<sup>1</sup>, I Gusti Ayu Purnamawati<sup>2</sup>, Gede Adi Yuniarta<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

email: <sup>1</sup>[putri.yani@student.undiksha.ac.id](mailto:putri.yani@student.undiksha.ac.id), <sup>2</sup>[ayu.purnamawati@undiksha.ac.id](mailto:ayu.purnamawati@undiksha.ac.id),

<sup>3</sup>[adi.yuniarta@undiksha.ac.id](mailto:adi.yuniarta@undiksha.ac.id)

### Abstract



**Purpose:** The research aims to analyze the growth and effectiveness of budget realization at the Public Works and Spatial Planning Agency (Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang) of Buleleng Regency during the 2020–2024 period, as well as identify the factors that influence it and the efforts made to improve performance.

**Research methods:** The study employed a descriptive quantitative method using growth and effectiveness ratio analyses based on the Budget Realization Report, supported by interview data.

**Findings:** The growth of budget realization fluctuated throughout the 2020–2024 period. A significant decline occurred from 2021 to 2023, reaching -49% (a very low category), primarily due to decreases in both capital and operational expenditures. Meanwhile, the effectiveness analysis revealed that the level of budget realization varied across expenditure types. Operational expenditures (employees, goods and services, and grants) were categorized as effective, with an average realization rate above 90%, while capital expenditures showed relatively lower effectiveness, ranging from 51% (ineffective) to 88% (fairly effective).

**Implication:** These findings indicate that the budget management of PUTR Buleleng has been well implemented in operational aspects, but still requires improvement in optimizing capital expenditures. The main influencing factors include: inadequate planning, procurement processes, and delays in tender.

**Keywords:** budget realization, effectiveness, growth, public sector budget.

### Abstrak

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng selama periode 2020–2024 serta mengidentifikasi faktor penyebab dan upaya peningkatannya.

**Metode penelitian:** Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio belanja pertumbuhan dan rasio belanja efektivitas berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran serta wawancara pendukung.

**Hasil:** Pertumbuhan realisasi anggaran belanja mengalami fluktuatif selama periode 2020-2024. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021–2023 dengan persentase mencapai -49% kategori sangat rendah, yang disebabkan oleh penurunan belanja modal serta belanja operasional. Sementara, hasil analisis efektivitas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran bervariasi antar jenis belanja. Belanja operasional (belanja pegawai, barang dan jasa, serta hibah) tergolong efektif dengan rata-rata realisasi >90%, sedangkan belanja modal menunjukkan efektivitas yang relatif lebih rendah, berkisar antara 51% (tidak efektif) hingga 88% (cukup efektif).

**Implikasi:** Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran Dinas PUTR telah baik pada aspek operasional namun masih perlu peningkatan dalam optimalisasi belanja modal. Adapun faktor utama yang memengaruhi antara lain perencanaan yang kurang matang, proses pengadaan barang dan jasa, keterlambatan pengadaan, proses pencairan dana, dan perubahan kebijakan. Adapun upaya yang sudah dilakukan mencakup peningkatan dukungan anggaran, melanjutkan kegiatan tertunda, dan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait.

### Sejarah Artikel

Diterima pada  
16 November 2025

Direvisi pada  
23 November 2025

Disetujui pada  
1 Desember 2025

**Kata kunci:** anggaran sektor publik, efektivitas, pertumbuhan, realisasi anggaran.

## PENDAHULUAN

Anggaran belanja memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan sebagai alat kebijakan, perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Lestari & Purnamawati, 2022). Pada pemerintahan daerah, anggaran menjadi instrumen dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Mardiasmo (2018), anggaran publik merupakan rencana kegiatan pemerintah dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja yang disusun secara sistematis. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif dan efisien menjadi syarat bagi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Purnamawati *et al.*, 2024). Pelaksanaan anggaran di tingkat daerah diwujudkan melalui penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang memuat informasi mengenai pendapatan dan belanja. Dalam pelaksanaannya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan menjadi kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah (Yuniarta & Purnamawati, 2020).

Sebagai upaya mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah, analisis pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja menjadi indikator penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program publik. Rasio pertumbuhan menunjukkan perubahan realisasi belanja dari tahun ke tahun, sedangkan rasio efektivitas mengukur kemampuan instansi dalam merealisasikan anggaran sesuai target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi rasio efektivitas dan pertumbuhan, semakin baik pula kinerja pengelolaan anggaran suatu instansi (Mahmudi, 2019). Namun kenyataannya, realisasi anggaran masih belum optimal baik di tingkat kementerian maupun daerah. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa realisasi anggaran pemerintah pusat pada 2023 baru mencapai 74% dari total pagu (Budiyanti, 2023). Beberapa penelitian menyebutkan bahwa faktor-faktor seperti perencanaan yang kurang matang, keterlambatan proses pengadaan barang dan jasa, sumber daya manusia, proses pencairan dana, serta perubahan kebijakan sering menjadi penyebab utama rendahnya realisasi anggaran (Elim, 2018).

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Buleleng yakni pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) yang memiliki peran penting dalam mengatur tata letak sarana dan prasarana daerah serta memastikan kegiatan pemeliharaan berjalan efektif. Realisasi Anggaran Dinas PUTR mengalami fluktiasi pertumbuhan dan efektivitas realisasi belanja selama periode 2020–2024, yang selengkapnya tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Data Anggaran dan Realisasi Belanja Dinas Pekerjaan Umum  
dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2020-2024  
[Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, 2025]

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Gap/Varian	Pertumbuhan	Efektivitas
2020	199.333.091.016	196.695.485.454	-2.637.605.562	29,90%	98,68%
2021	124.523.395.540	99.661.651.054	-24.861.744.486	-49,33%	80,03%
2022	81.100.576.325	70.520.336.545	-10.580.239.780	-29,24%	86,95%
2023	87.598.225.449	61.844.741.706	-25.753.483.743	-12,30%	70,60%
2024	133.514.801.333	108.890.734.942	-24.624.066.391	76,07%	81,56%

Tabel 1 menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja selama tahun 2020-2024 memiliki gap antara target dan realisasi yang tidak sesuai dengan diharapkan serta realisasinya cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2024 realisasi anggaran meningkat sejumlah 76% dengan total peningkatan sejumlah Rp47.045.993.236. Namun realisasi anggaran belanja tahun 2024 tetap tidak mencapai rancangan anggaran yang telah direncanakan. Dari tabel 1 tersebut juga dapat dijelaskan bahwa dalam tiga tahun (2021-2023) penggunaan anggaran pada Dinas PUTR selalu mengalami penurunan sehingga mempengaruhi pertumbuhan realisasi anggaran dan efektivitas program kerja dalam pelaksanaan anggarannya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti terkait pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja daerah, diantaranya Rahayu & Ramdani (2021), Nasution & Purba (2022), serta Armono *et al.* (2023) menemukan bahwa tingkat efektivitas realisasi anggaran belanja pada program kegiatan pemerintah daerah berada pada kategori cukup efektif. Sementara penelitian oleh Indiskayani *et al.* (2024), Gama *et al.* (2023), dan Cahyo (2024) menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas anggaran tergolong efektif, meskipun rasio pertumbuhan bersifat fluktuatif.

Kebaruan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, periode kajian, serta pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, yang hingga saat ini belum menjadi objek kajian serupa. Selain itu, penelitian ini tidak hanya menganalisis efektivitas dan pertumbuhan realisasi anggaran berdasarkan tahun anggaran, tetapi juga mengklasifikasikan analisisnya berdasarkan jenis belanja, sehingga hasil yang diperoleh dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan komprehensif mengenai pengelolaan anggaran. Metode penelitian ini juga dilengkapi dengan data wawancara langsung bersama pihak terkait di Dinas PUTR sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif.

Urgensi penelitian ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Regulasi tersebut menegaskan bahwa belanja daerah harus dilaksanakan secara efisien, efektif, berprioritas, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan kualitas belanja yang optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan evaluasi kinerja keuangan melalui analisis rasio pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran. Hasil analisis ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam memperbaiki perencanaan, meningkatkan serapan anggaran, serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja, sekaligus mengidentifikasi faktor penyebab dan upaya peningkatan efektivitas pelaksanaannya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng periode 2020–2024.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan tingkat pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh

peneliti langsung dari Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng yang berupa hasil wawancara, serta laporan realisasi anggaran tahun 2020-2024. Sementara data sekunder berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, situs web, dan media lainnya yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi realisasi anggaran serta upaya peningkatannya. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi nyata pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran di lapangan, sedangkan dokumentasi digunakan untuk memperoleh data kuantitatif berupa dokumen Laporan Realisasi Anggaran. Untuk metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu analisis rasio pertumbuhan dan rasio efektivitas.

### a. Rasio Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan digunakan untuk mengetahui perkembangan realisasi belanja dari tahun 2020-2024. Adapun untuk menghitung rasio pertumbuhan realisasi belanja dapat menggunakan rumus (Yuliani & Purnamawati, 2025):

$$\text{Rasio Pertumbuhan Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } t - \text{Realisasi Belanja Tahun } t-1}{\text{Realisasi Belanja Th } t-1} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat pertumbuhan realisasi anggaran, rasio pertumbuhan diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2: Klasifikasi Kriteria Rasio Pertumbuhan  
[Sumber: Anugeraheni & Yuniarta, 2022]

Percentase	Kriteria Pertumbuhan
>40%	Tinggi
21-30%	Sedang
11-20%	Rendah
>0-10%	Sangat Rendah

### b. Rasio Efektivitas

Rasio ini dihitung dengan cara membandingkan antara realisasi yang telah dicapai dengan target yang ditetapkan (Dewi & Werastuti, 2024).

$$\text{Rasio Efektivitas Anggaran} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat pencapaian, rasio efektivitas diklasifikasikan ke dalam beberapa kriteria yang termuat pada Tabel 3.

Tabel 3: Klasifikasi Kriteria Rasio Efektivitas  
[Sumber: Mahmudi, 2019]

Percentase	Kriteria Pertumbuhan
>100%	Sangat Efektif
>90-≤ 100%	Efektif
>80-≤90%	Cukup Efektif
≥60-≥80%	Kurang Efektif
<60%	Tidak Efektif

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Rasio Pertumbuhan

Analisis pertumbuhan realisasi belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun (Mahmudi, 2019). Pada penelitian ini gambaran secara umum mengenai hasil analisa rasio pertumbuhan belanja terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2020–2024 tersaji pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4: Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan Realisasi Anggaran Belanja Secara Umum Tahun 2020-2024  
[Sumber: Diolah Peneliti, 2025]

Tahun	Realisasi Belanja	Pertumbuhan	Kriteria
2019	155.003.273.735	-	-
2020	196.695.485.454	26,90%	Sedang
2021	99.661.651.054	-49,33%	Sangat Rendah
2022	70.520.336.545	-29,24%	Sangat Rendah
2023	61.844.741.706	-12,30%	Sangat Rendah
2024	108.890.734.942	76,07%	Tinggi

Berdasarkan Tabel 4, dapat dilihat bahwa perkembangan rasio pertumbuhan realisasi anggaran belanja Dinas PUTR Kabupaten Buleleng periode 2020–2024 mengalami fluktuasi. Tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 26,90% (kategori Sedang). Namun, tiga tahun berikutnya yakni tahun 2021-2023 justru mengalami penurunan dengan pertumbuhan negatif, dimana hasil analisis ketiga tahun tersebut, masuk kategori Sangat Rendah. Pada tahun 2024, kondisi kembali membaik dengan pertumbuhan positif yang tinggi mencapai 76,07% dengan kategori Tinggi.

Terjadinya penurunan rasio pertumbuhan belanja pada periode 2021 hingga 2023 menunjukkan pentingnya kajian komprehensif berdasarkan klasifikasi jenis belanja dari tahun 2020-2024. Analisis per jenis belanja bertujuan mengidentifikasi komponen belanja yang paling berkontribusi terhadap penurunan tersebut serta menelusuri faktor penyebabnya. Adapun secara umum hasil analisis berdasarkan klasifikasi belanja rasio pertumbuhan disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5: Analisis Rasio Pertumbuhan Belanja Berdasarkan Klasifikasi Belanja Tahun 2020-2024  
[Sumber: Diolah Peneliti, 2025]

Jenis Belanja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
B. Pegawai	-33	Sangat rendah	45	Tinggi	0,9	Sangat Rendah	11,4	Rendah	5,28	Sangat rendah
B. Barang dan Jasa	-14,4	Sangat Rendah	12	Rendah	-28,1	Sangat Rendah	-44,8	Sangat Rendah	-4,57	Sangat Rendah

B. Hibah	166	Tinggi	110	Tinggi	39,1	Tinggi	-73,5	Sangat Rendah	648,4	Tinggi
B.M.Tanah	-100	Sangat Rendah	-	-	-	-	100	Tinggi	-85,9	Sangat Rendah
B. Peralatan dan Mesin	-77	Sangat Rendah	4,3	Rendah	-36,9	Sangat Rendah	-64,9	Sangat Rendah	-3,45	Sangat Rendah
B.Bangunan dan Gedung	341	Tinggi	-100	Sangat Rendah	100	Tinggi	1314	Tinggi	100	Tinggi
B.M. Jalan, Jaringan, Irigasi	-84	Sangat Rendah	354	Tinggi	-46,4	Sangat Rendah	-28,7	Sangat Rendah	232,9	Tinggi

Berdasarkan hasil analisis, adapun penurunan pertumbuhan belanja pada tahun 2020 terutama dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja peralatan dan mesin yang mencapai -77% serta belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang turun hingga -84%. Pada tahun 2021, penurunan pertumbuhan dipengaruhi oleh tidak terlaksananya belanja bangunan dan gedung sebesar -100%. Selanjutnya, pada tahun 2022 penurunan pertumbuhan disebabkan oleh belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang turun -46,4%, belanja barang dan jasa yang menurun -28,1%, serta belanja peralatan dan mesin sebesar -36,9%. Kondisi tahun 2023 juga menunjukkan pola serupa, di mana penurunan pertumbuhan belanja dipengaruhi realisasi belanja barang dan jasa sebesar -44,8% serta belanja peralatan dan mesin yang turun -64,9%. Pada tahun 2024, disebabkan oleh penurunan pada belanja modal tanah yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar -85,9%.

Hasil analisis menunjukkan bahwa pertumbuhan penyerapan anggaran Dinas PUTR Kabupaten Buleleng masih berfluktuasi pada belanja operasional maupun belanja modal. Berdasarkan wawancara dengan Kadek Maha Kusuma Giri selaku Bendahara Pengeluaran, fluktuasi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah dan pusat yang menentukan alokasi anggaran setiap tahun. Meskipun usulan anggaran telah diajukan, besaran dana yang diterima disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan yang ditetapkan. Pergeseran fokus pembangunan juga menyebabkan variasi alokasi belanja antar tahun. Selain itu, pandemi COVID-19 pada 2020–2021 turut memengaruhi penyerapan anggaran melalui kebijakan refocusing, di mana sebagian dana dialihkan untuk sektor kesehatan dan pemulihan ekonomi. Kondisi ini berdampak pada penundaan beberapa program, khususnya pada belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi.

Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa pertumbuhan penyerapan realisasi belanja pada Dinas PUTR Kabupaten Buleleng tahun 2020-2024 menunjukkan pola yang belum stabil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Saputra (2023) yang menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan belanja daerah sangat bergantung pada kebijakan pemerintah daerah dan arah prioritas pembangunan tahunan yang ditetapkan. Selain itu, penelitian oleh Nasution & Purba (2022) juga menegaskan bahwa penurunan realisasi belanja pada beberapa instansi pemerintah dipengaruhi oleh perubahan nomenklatur kelembagaan, transfer struktur eselon, serta dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan terjadinya refocusing dan penyesuaian alokasi anggaran.

## Rasio Efektivitas

Efektivitas didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu lembaga dalam menunjukkan pelaksanaan program sesuai perencanaan dan pencapaian tujuan (Sari & Diatmika, 2022). Pada penelitian ini gambaran secara umum mengenai hasil analisa rasio efektivitas belanja terhadap realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng Tahun 2020–2024 tersaji pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis Rasio Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Secara Umum Tahun 2020-2025.  
[Sumber: Diolah Peneliti, 2025]

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	Efektivitas	Kriteria
2020	196.695.485.454	196.695.485.454	98,68%	Efektif
2021	99.661.651.054	99.661.651.054	80,03%	Cukup Efektif
2022	70.520.336.545	70.520.336.545	86,95%	Cukup Efektif
2023	61.844.741.706	61.844.741.706	70,60%	Kurang Efektif
2024	108.890.734.942	108.890.734.942	81,56%	Cukup Efektif

Berdasarkan Tabel 6, rasio efektivitas realisasi anggaran belanja Dinas PUTR Kabupaten Buleleng periode 2020–2024 menunjukkan fluktuasi. Tahun 2020 mencapai 98,68% dengan kategori efektif, namun menurun pada 2021 yakni 80,03% cukup efektif dan pada tahun 2022 sebesar 86,95% yang masih tergolong cukup efektif. Penurunan terendah terjadi pada 2023 dengan persentase 70,60% (kurang efektif), sebelum kembali naik pada 2024 menjadi 81,56% yang tergolong cukup efektif. Secara garis besar, efektivitas anggaran sempat optimal di awal periode, menurun pada tiga tahun berikutnya, dan mulai membaik kembali di 2024.

Belum optimalnya realisasi anggaran belanja selama periode tahun 2020–2024 menunjukkan pentingnya mengkaji rasio efektivitas per jenis belanja, sehingga dapat diidentifikasi komponen belanja yang paling optimal maupun yang masih belum efektif dalam pemanfaatan anggaran. Adapun hasil analisis berdasarkan klasifikasi belanja disajikan per tahun anggaran disajikan pada tabel 7.

Tabel 7. Analisis Rasio Efektivitas Belanja Berdasarkan Klasifikasi Belanja Tahun 2020-2024  
[Sumber: Diolah Peneliti, 2025]

Jenis Belanja	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024	
	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria	%	Kriteria
B. Pegawai	97,7	Efektif	99,34	Efektif	98,23	Efektif	99,09	Efektif	98,90	Efektif
B. Barang dan Jasa	98,6	Efektif	91,66	Efektif	92,60	Efektif	93,89	Efektif	92,54	Efektif
B. Hibah	100	Efektif	96,55	Efektif	92,80	Efektif	100	Efektif	95,48	Efektif
B.M. Tanah	-	-	-	-	-	-	87,56	Cukup Efektif	100	Efektif
Peralatan dan Mesin	99,1	Efektif	93,79	Efektif	81,97	Cukup Efektif	31,98	Tidak Efektif	95,68	Efektif
B.Bangunan & Gedung	100	Efektif	-	-	88,36	Cukup Efektif	51,63	Tidak Efektif	99,92	Efektif

B.M. Jalan, Jaringan, Irigasi	84,4	Cukup Efektif	69,39	Kurang Efektif	77,14	Kurang Efektif	55,27	Tidak Efektif	73,25	Kurang Efektif
-------------------------------------	------	---------------	-------	----------------	-------	----------------	-------	---------------	-------	----------------

Berdasarkan hasil analisis efektivitas realisasi anggaran belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng periode 2020–2024, terlihat bahwa efektivitas anggaran bervariasi antar jenis belanja. Belanja pegawai konsisten berada pada kategori efektif dengan capaian >97%, menunjukkan bahwa pembayaran gaji dan tunjangan mampu direalisasikan secara optimal. Belanja barang dan jasa juga tergolong efektif, berkisar antara 91–98%, yang menandakan kebutuhan operasional instansi dapat terpenuhi dengan baik. Belanja hibah bahkan mencapai realisasi penuh sebesar 100% pada tahun 2020 dan 2023, sehingga dapat dikategorikan sangat efektif.

Sebaliknya, belanja modal menunjukkan capaian yang fluktuatif dan cenderung lebih rendah dibandingkan belanja rutin. Belanja peralatan dan mesin misalnya, pada tahun 2022 tergolong cukup efektif (81,97%) namun menurun tajam pada tahun 2023 menjadi 31,98% yang tergolong tidak efektif. Berdasarkan wawancara dengan I Made Swadiyasa Putra, selaku Kepala Subbagian Umum, penurunan tersebut disebabkan oleh munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) karena harga penawaran dari penyedia lebih rendah dari perkiraan awal, serta kendala penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang membatasi pengadaan alat tertentu. Akibatnya, sebagian kegiatan tidak dapat dilaksanakan meskipun anggaran tersedia.

Belanja modal bangunan dan gedung mengalami fluktuasi efektivitas yang cukup tajam selama periode 2020–2024. Setelah mencapai realisasi penuh pada tahun 2020, tingkat efektivitas menurun pada tahun 2022 dan 2023. Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gusti Bagus Suryadarma, selaku Kepala Bidang Penataan Bangunan, rendahnya efektivitas pada tahun 2022 disebabkan oleh munculnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) akibat selisih antara pagu anggaran dan nilai kontrak hasil pengadaan. Nilai kontrak yang lebih rendah dari anggaran menyebabkan sebagian dana tidak terserap meskipun kegiatan telah selesai dilaksanakan. Sementara pada tahun 2023, efektivitas kembali menurun signifikan karena beberapa faktor administratif dan teknis, antara lain: tidak terlaksananya kegiatan perjalanan dinas akibat ketiadaan surat undangan, tidak dibayarkannya belanja pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua sesuai Instruksi Bupati Nomor 900/207.36/2023, serta belum diperolehnya rekomendasi pelaksanaan untuk sejumlah kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Selain itu, penundaan pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi menyebabkan beberapa program tidak terealisasi, termasuk pekerjaan fisik Taman Pendidikan Digital yang gagal tender karena nilai perencanaan melebihi pagu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Kondisi tersebut menyebabkan penyerapan anggaran tidak optimal dan menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) cukup besar pada tahun 2023.

Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi cenderung berada pada kategori kurang efektif sepanjang periode 2020–2024. Berdasarkan Tabel 7 efektivitas belanja ini berfluktuasi dari 84,41% pada 2020 (cukup efektif), turun menjadi 69,39% pada 2021 (kurang efektif), meningkat menjadi 77,14% pada 2022, kemudian turun signifikan pada 2023 sebesar 55,27% (tidak efektif), dan kembali naik menjadi 73,25% pada 2024 (cukup efektif). Berdasarkan keterangan Ketut Budiyasa, ST, Kepala Bidang Bina Marga, rendahnya efektivitas pada 2021 disebabkan oleh tidak terserapnya sebagian pagu Dana Alokasi Khusus (DAK) serta putus kontrak dengan

rekanan konstruksi. Pada 2022, meskipun terjadi peningkatan realisasi, efektivitas masih belum optimal karena penyedia jasa konstruksi terlambat menyelesaikan pekerjaan akibat keterbatasan material. Pada 2023, penurunan yang cukup besar dipengaruhi oleh terlambatnya pencairan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi, tingginya target anggaran, serta lokasi proyek yang jauh sehingga distribusi material terhambat. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian pekerjaan tidak selesai hingga akhir tahun dan tercatat sebagai pekerjaan lanjutan. Adapun pada 2024, efektivitas kembali tidak optimal akibat keterlambatan tender yang dipicu perubahan sistem pengadaan, serta kondisi cuaca dengan curah hujan tinggi yang menghambat pekerjaan lapangan. Faktor-faktor ini berdampak pada tidak maksimalnya serapan anggaran dan meningkatnya SILPA pada akhir tahun anggaran.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja rutin seperti pegawai, barang dan jasa, serta belanja hibah lebih mudah direalisasikan karena bersifat berulang dan wajib. Hal ini sejalan dengan temuan Rahayu & Ramdani (2021) yang menyatakan bahwa belanja pegawai hampir selalu efektif sebab merupakan pengeluaran rutin yang memiliki kepastian hukum dan waktu realisasi yang tetap. Sementara itu, belanja modal seringkali menunjukkan efektivitas yang rendah karena masih terdapat kegiatan yang telah dianggarkan namun tidak dapat dilaksanakan (Prasetyo & Nugraheni, 2020). Pendapat lainnya juga diungkapkan oleh Nirwayadhi & Dewi (2025) yang menyatakan bahwa ketidakefektifan realisasi anggaran disebabkan oleh belum terlaksananya sebagian kegiatan yang sudah dialokasikan dalam APBD. Selain itu, proses pengadaan juga menjadi faktor penting dalam efektivitas penyerapan anggaran. Rinaldi *et al.* (2024) menegaskan bahwa keterlambatan pelaksanaan pengadaan merupakan penyebab utama rendahnya efektivitas belanja modal di berbagai instansi pemerintah daerah.

### **Faktor Penyebab Penurunan dan Ketidakefektifan Realisasi Anggaran**

Tingkat pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran Dinas PUTR Kabupaten Buleleng tahun 2020–2024 menunjukkan adanya kendala yang menghambat optimalisasi beberapa jenis belanja, terutama belanja modal. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat terkait, ditemukan sejumlah faktor utama yang berpengaruh terhadap rendahnya efektivitas realisasi anggaran.

#### **1. Perencanaan yang Kurang Matang**

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan anggaran di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng masih menghadapi ketidakstabilitan antara kebutuhan riil dan pagu yang ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran, Kadek Maha Kusuma Giri bahwa “kami sudah mengajukan anggaran sesuai kebutuhan, tapi yang disetujui menyesuaikan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.” Selain itu, Kasubag Umum, I Made Swadiyasa Putra, menjelaskan bahwa terjadinya SILPA juga dipengaruhi oleh pagu anggaran yang terlalu tinggi dibandingkan kondisi lapangan, sebagaimana diungkapkan: “pagunya tinggi, tapi harga penawaran penyedia lebih rendah, jadi ada dana sisa yang tidak bisa dipakai lagi.” Temuan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan belum sepenuhnya akurat dalam memperkirakan kebutuhan, sehingga menghambat optimalisasi penyerapan anggaran. Hasil ini sejalan dengan Putri *et al.* (2018) serta Rerung *et al.* (2018) yang menegaskan bahwa

perencanaan yang kurang cermat berpotensi menurunkan pencapaian target realisasi anggaran.

## 2. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan kegiatan di lapangan turut memengaruhi realisasi anggaran, karena meskipun perencanaan telah disusun dengan baik, berbagai kendala teknis sering muncul dalam proses pelaksanaannya. Berdasarkan wawancara dengan Ketut Budiyyasa, selaku Kepala Bidang Bina Marga, disampaikan bahwa “kadang material lama datang karena lokasi proyek jauh dan hujan terus di akhir tahun, jadi pekerjaan molor... cuaca juga jadi penghambat pelaksanaan anggaran.” Pernyataan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti cuaca, kondisi geografis, dan potensi bencana alam yang menghambat proses konstruksi. Dengan demikian, kendala pada tahap pelaksanaan tidak hanya berasal dari aspek administratif, tetapi juga dari situasi lapangan yang sulit dikendalikan, sebagaimana ditegaskan pula oleh Rerung *et al.* (2018).

## 3. Pengadaan Barang dan Jasa

Hambatan dalam pengadaan barang dan jasa menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi rendahnya realisasi anggaran di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Ketut Budiyyasa selaku Kepala Bidang Bina Marga menjelaskan bahwa “kadang ada program kerja yang gagal tender karena harga penawaran lebih tinggi dari pagu anggaran, jadi otomatis tidak bisa dilanjutkan.” Hal ini menunjukkan bahwa ketidaksesuaian antara pagu anggaran dan harga penawaran kontraktor sering menyebabkan tender gagal, sehingga pekerjaan tertunda dan anggaran tidak terserap optimal. Kondisi ini berpotensi menimbulkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) pada akhir tahun. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nirwayadhi & Dewi (2025) yang menyebutkan bahwa keterlambatan tender dan ketidaksesuaian harga dengan pagu merupakan faktor umum yang menghambat realisasi anggaran di instansi pemerintah.

## 4. Proses Pencairan Dana

Selain perencanaan dan pengadaan, keterlambatan pencairan dana juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi anggaran di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Berdasarkan wawancara dengan Ketut Budiyyasa, selaku Kepala Bidang Bina Marga, dijelaskan bahwa *“tahun 2023 dana BKK dari provinsi terlambat cair, akibatnya pekerjaan tidak bisa diselesaikan tepat waktu.”* Keterlambatan ini menghambat pelaksanaan kegiatan fisik, terutama yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus (BKK), sehingga sebagian pekerjaan tidak terselesaikan dan harus dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian, proses pencairan dana yang tidak tepat waktu menjadi salah satu penyebab rendahnya serapan anggaran belanja modal. Temuan ini sejalan dengan Elim *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa keterlambatan pencairan dana transfer daerah berdampak pada berkurangnya waktu pelaksanaan dan menurunkan pencapaian target output program.

## 5. Regulasi dan Kebijakan Pemerintah

Selain kendala teknis dan administratif, regulasi dan kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi rendahnya realisasi anggaran di Dinas PUTR Kabupaten Buleleng. Berdasarkan wawancara dengan I Made Swadiyasa Putra, selaku Kepala Subbagian Umum, dijelaskan bahwa *"tahun 2023 ada beberapa alat yang tidak bisa dibeli karena aturan TKDN... padahal alat itu penting untuk kegiatan di lapangan."* Hal ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sejak tahun 2022 membatasi proses pengadaan karena beberapa peralatan tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan meskipun anggaran tersedia. Selain itu, perubahan arah prioritas pembangunan daerah setiap tahun menyebabkan sebagian program tertunda atau tidak dilaksanakan karena penyesuaian kebijakan. Temuan ini sejalan dengan Elim *et al.* (2018) yang menegaskan bahwa kompleksitas regulasi berpengaruh langsung terhadap kelancaran penyerapan anggaran.

### Upaya Mengatasi Penurunan dan Ketidakefektifan Realisasi Anggaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kadek Maha Kusuma Giri, selaku Bendahara Pengeluaran dan Luh Putu Ratna Rosliana selaku Staf Keuangan Bagian Pelaporan Dinas PUTR Kabupaten Buleleng, diketahui bahwa terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan realisasi anggaran belanja di tahun selanjutnya.

#### 1. Peningkatan Anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah

Salah satu upaya yang dilakukan Dinas PUTR Kabupaten Buleleng untuk meningkatkan realisasi anggaran adalah memperkuat dukungan pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah. Hal ini ditegaskan oleh Putu Ratna Rosliana yang menyatakan bahwa *"kalau anggaran dari pusat dan daerah bisa ditingkatkan, otomatis program-program yang ada bisa lebih cepat dijalankan dan realisasinya juga akan lebih maksimal."* Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kecukupan alokasi dana berperan penting dalam mempercepat pelaksanaan program, khususnya pada kegiatan infrastruktur yang membutuhkan biaya besar. Dengan dukungan fiskal yang memadai, perangkat daerah dapat menjalankan program prioritas tanpa mengalami hambatan keuangan sehingga efektivitas realisasi belanja dapat meningkat dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih optimal.

#### 2. Melanjutkan Pembangunan yang Tertunda

Upaya berikutnya untuk meningkatkan efektivitas realisasi anggaran adalah dengan melanjutkan pembangunan yang tertunda pada tahun anggaran sebelumnya. Hal ini disampaikan oleh Putu Ratna Rosliana yang menyatakan bahwa *"dengan pembangunan terus dilanjutkan... serapannya juga bisa lebih baik."* Selain itu, Kadek Maha Kusuma Giri menegaskan bahwa *"dengan melanjutkan kegiatan yang tertunda, dinas dapat meminimalisir risiko terjadinya SILPA."* Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesinambungan pembangunan berperan penting dalam menjaga efisiensi pelaksanaan anggaran, karena kegiatan yang tertunda dapat segera direalisasikan tanpa mengulang proses perencanaan, sehingga mempercepat pencapaian target pembangunan daerah..

### 3. Koordinasi dengan Pihak Terkait

Peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak juga menjadi langkah strategis dalam memperbaiki efektivitas pelaksanaan anggaran. Kadek Maha Kusuma Giri menjelaskan bahwa “*kadang kendalanya bukan di dinas saja, tapi juga karena koordinasi dengan pihak penyedia atau instansi lain belum maksimal.*” Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi yang lebih intensif baik antar bidang di internal Dinas PUTR maupun dengan pihak eksternal seperti penyedia jasa dan instansi terkait dapat mempercepat penyelesaian administrasi, meminimalkan miskomunikasi, serta memastikan setiap tahap kegiatan berjalan lebih tepat waktu.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertumbuhan dan efektivitas realisasi anggaran belanja Dinas PUTR Kabupaten Buleleng tahun 2020–2024, diperoleh beberapa temuan penting. Pertumbuhan realisasi anggaran menunjukkan tren yang berfluktuasi, di mana tahun 2020 berada pada kategori sedang, kemudian menurun sangat rendah pada 2021–2023 akibat melemahnya belanja modal khususnya belanja jalan, jaringan, dan irigasi serta penurunan belanja barang dan jasa dan belanja hibah pada tahun 2023. Pada 2024, pertumbuhan kembali meningkat ke kategori tinggi seiring meningkatnya realisasi belanja hibah serta belanja modal di bidang jalan, jaringan, dan irigasi. Efektivitas realisasi anggaran juga bervariasi antar jenis belanja; belanja operasional seperti pegawai, barang dan jasa, dan hibah umumnya efektif dengan rata-rata realisasi >90%, sedangkan belanja modal menunjukkan efektivitas yang lebih rendah dan tidak stabil, terutama pada peralatan dan mesin, bangunan dan gedung, serta jalan, jaringan, dan irigasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, antara lain perencanaan yang kurang tepat, hambatan dalam proses pengadaan, kendala teknis pelaksanaan di lapangan, keterlambatan pencairan dana, dan perubahan regulasi pemerintah, serta faktor eksternal seperti pandemi COVID-19. Untuk mengatasi kendala tersebut, Dinas PUTR Kabupaten Buleleng telah melakukan sejumlah upaya, termasuk meningkatkan koordinasi pendanaan dengan pemerintah pusat dan daerah, melanjutkan kegiatan pembangunan yang tertunda, serta memperkuat koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal guna memperlancar realisasi anggaran.

Penelitian berikutnya disarankan menggunakan ruang lingkup yang lebih luas, baik dengan menambah objek pada perangkat daerah berbeda maupun memperluas periode kajian untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pola realisasi anggaran. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Buleleng, perencanaan anggaran perlu disusun dengan lebih cermat dengan memperhatikan kondisi cuaca, kesiapan lokasi, dan perubahan harga material. Kelengkapan dokumen teknis serta perizinan harus dipastikan sejak awal untuk mencegah revisi berulang dan meminimalkan potensi SILPA. Proses pengadaan juga perlu menyesuaikan kondisi pasar dan ketersediaan material, disertai penguatan koordinasi dengan penyedia jasa maupun antarbagian internal melalui kontrak yang jelas, mekanisme sanksi, dan monitoring rutin. Selain itu, monitoring dan evaluasi berkala penting dilakukan untuk mengidentifikasi kendala lebih cepat dan menjadi dasar peningkatan kualitas penyusunan anggaran pada tahun berikutnya.

## REFERENSI

- Anugeraheni, N. K. D., & Yuniarta, G. A. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Desa dengan Menggunakan Rasio Keuangan Daerah Pada Pemerintah Desa Pejarkan, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng Tahun 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 13(2), 426-437. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/36338>.
- Armono, D., Widyaningsih, N., & Nurhayanto. (2023). Analisis Efisiensi dan Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja pada Dinas Koperasi, UMK, UM dan Perindustrian Kota Metro Tahun Anggaran 2017-2020. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 20(1), 323-331. <https://doi.org/10.20885/jabis.vol20.iss1.art2>.
- Budiyanti, E. (2024). Rendahnya Realisasi Anggaran Pemerintah Menjelang Akhir Tahun 2024. *Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian Setjen DPR RI*. <https://berkas.dpr.go.id/>.
- Cahyo, P. N. (2024). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018-2022. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 9(2), 214-223. <http://ejournal.unikama.ac.id>.
- Dewi, K. B. R., & Werastuti, D. N. S. (2024, 385-401). Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Melalui Pengukuran Value for Money untuk Menilai Akuntabilitas Kinerja Keuangan Instansi Pemerintah Desa Lokasari. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 14(3). <https://doi.org/10.23887/jah.v14i3.79749>.
- Elim, M. A., Ndaparoka, D. S., & Tomasowa, T. E. D. (2018). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Kota Kupang. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Audit*, 3(2), 46-56.
- Gama, L. d. S., Wiagustini, N. L. P., & Soaresc, A. D. C. (2023). Analysis of the Effectiveness and Efficiency of Local Government Budget Utilization. *Journal Of Digitainability, Realism & Mastery (Dream)*, 2(12), 443-462. <https://doi.org/10.56982/dream.v2i12.188>.
- Indiskayani, Nengsih, T. A., & Angraini, D. (2024). Analisis kinerja keuangan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan pada Desa Sribunga. *E-Jurnal Perdagangan Industri dan Moneter*, 12(2), 109-121. <https://online-journal.unja.ac.id/pim/article/view/36875/19295>.
- Lestari, N. K. E. K., & Purnamawati, I. G. A. (2022). Analisis Implementasi E-Budgeting Menggunakan Model CIPP (Context, Input, Process, and Product) Serta Dampaknya Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik Di SKPD Kabupaten Karangasem. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(03), 810-821. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i03.36833>.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi.
- Nasution, V. W., & Purba, R. B. (2022). An Analysis of Effectiveness And Efficiency Budget Realization As Performance Measurement Polytechnic Medan. *Jurnal Ekonomi*, 11(03), 2024-2030. <http://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>.
- Nirwayadhi, P. I., & Dewi, N. A. W. T. (2025). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang Jasa terhadap Penyerapan Anggaran Belanja pada OPD Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 15(2), 371-385. <https://doi.org/10.23887/jah.v15i2.100846>.
- Prasetyo, W. H., & Nugraheni, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015 – 2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 11(1), 1-10. <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24639>.

- Purnamawati, I. G. A., Yuniarta, G. A., & Nugraha, I. G. B. B. (2024). Strategy and Sustainability of Ecotourism Villages in the Buleleng Regency. *International Journal of Organizational Behavior and Policy*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.9744/ijobp.3.1.1-14>.
- Putri, K. M. R., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2018). Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Komitmen Organisasi Terhadap Penyerapan Anggaran (Survei Pada SKPD di Wilayah Pemerintah Daerah Provinsi Bali). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2), 1-10. <https://doi.org/10.23887/jimat.v8i2.13679>.
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill"*, 8(2), 192-202. <https://doi.org/10.35800/irs.v8i2.17947>.
- Rinaldi, R., Hasibuan, A. P., Lubis, P. K. D., & Simanungkalit, J. (2024). Analisis Efektivitas Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2021-2023. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 2(2), 278-288. <https://doi.org/10.61132/jepi.v2i2.605>.
- Saputra, E., Latif, I. N., & Haryadi, R. M. (2020). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 9(2), 1-11. <https://doi.org/10.31293/ekm.v9i2.4893>.
- Sari, S. A. M. R., & Diatmika, I. P. G. (2022). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pajak Reklame serta Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019–2021. *Jurnal Riset Akuntansi*, 11(1), 42-51. <https://doi.org/10.23887/vjra.v11i01.50325>.
- Yuliani, M. R., & Purnamawati, I. G. A. (2025). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Di BPKPD Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 16(02), 276-286. <https://doi.org/10.23887/jimat.v16i02.80502>.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Key elements of local government transparency in new public governance. *Key elements of local government transparency in new public governance*, 18(4), 96-106. doi:10.21511/ppm.18(4).2020.09.